



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISWAHYUDI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 400184

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 272.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA VEGA 110 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 134.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 21.311.524

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.377.311.524

III. HUTANG Rp. 33.502.067

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.343.809.457

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.